



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **ANALISIS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

## **TESIS**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
pada Program Studi Perdata Islam  
Konsentrasi Hukum Perdata Islam



Oleh :

**JALALUDDIN AY**  
**NIM. 505940007**

**PROGRAM PASCASARJANA  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Disusun oleh:

**JALALUDDIN AY**  
**NIM. 505940007**

Telah diujikan pada tanggal 25 Agustus 2011  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum Islam (M. HI)

Cirebon, 13 September 2011

Dewan Penguji

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota ,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Pembimbing/Penguji,

Pembimbing/Penguji,

Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

Penguji Utama

Dr. H. Attabiq Luthfi, MA

Direktur,

**Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag**  
**Nip. 19680408 199404 1 003**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **ANALISIS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Disusun Oleh :

**JALALUDDIN AY**  
**NIM. 505940007**

Telah disetujui pada Tanggal Agustus 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag**

**Dr. Achmad Kholiq, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag**

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

**NOTA DINAS**

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Jalaluddin AY NIM. 505940007 yang berjudul:

*“Analisis Perceraian di Tinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif”* telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Agustus 2011

Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**Dr. Achmad Kholiq, M.Ag**

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

**NOTA DINAS**

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Jalaluddin AY NIM. 505940007 yang berjudul:

*“Analisis Perceraian di Tinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif”* telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Agustus 2011

Pembimbing II,

**Dr. Achmad Kholiq, M.Ag**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PERNYATAAN KEASLIAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JALALUDDIN AY**

NIM : 505940007

Program Studi : Hukum dan Peradilan Islam

Konsentrasi : Hukum Perdata Islam

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati  
Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS berjudul: “*Analisis Perceraian di Tinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*” secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Agustus 2011

Yang membuat pernyataan

**JALALUDDIN AY**





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRAKSI

**JALALUDDIN AY:** *“Analisis Perceraian di Tinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif”*

Kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Masalah ini adalah bagaimana ketentuan hukum Islam tentang perceraian, bagaimana pandangan hukum positif tentang perceraian, dan bagaimana relevansi hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang perceraian, untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang perceraian, dan untuk mengetahui relevansi hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian ini berusaha mengungkapkan perceraian dari aspek hukum Islam dan hukum positif melalui sumber data yang relevan dengan kebutuhan, baik buku-buku teks, jurnal, atau majalah-majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Jika kita amati dari pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Fiqih Syafi'iyah memiliki perbedaan yang sangat mendasar, disamping itu dalam konteks penghuitungan talakpun memiliki perbedaan. Yaitu jika keabsahan versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah talak harus dilakukan didepan sidang dan disaksikan oleh hakim, sedangkan keabsahan talak versi fiqih Syafi'iyah sah walaupun dilakukan dimana saja asalkan telah memenuhi syarat-syaratnya. Hakim dalam menyikapi perbedaan antara dua konsep tersebut adalah hukum itu dapat berubah menurut zaman, tempat, situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu janganlah berpedoman pada produk hukum yang matang saja tetapi juga pada metode penggalan hukumnya. Agar dalam menentukan hukum itu bisa lebih luwes dan fleksibel.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## BIODATA PRIBADI

### I. Identitas Pribadi

Nama : JALALUDDIN AY  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 19 Maret 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Pulosaren Gg. KH. Abdul Wahab  
Losari Lor - Brebes  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Motivasi : **"Man Jadda Wa Jada"**

### II. Keluarga

Nama Ayah : Drs. H. Marzuki Dimyati  
Nama Ibu : Hj. Sa'diyah

### III. Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil Pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### IV. Pendidikan

1. SD Islam Losari Lor - Brebes : Lulus tahun 1981
2. SMP Islam Losari Lor- Brebes : Lulus tahun 1984
3. SMA Al-Islam Surakarta : Lulus tahun 1988
4. S1 UNINUS Fakultas Hukum : Lulus tahun 1994
5. S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon : Lulus tahun 2011





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: “*Analisis Perceraian di Tinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua, Isteri, Anak-anakku dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Attabik Lutfi, MA., Ketua Program Studi Hukum dan Peradilan Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag, Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. H. Achmad Kholiq, MA., Dosen Pembimbing II.
7. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis ushakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, Agustus 2011

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

=	a	=	f	
=	b	=	q	
=	ts	=	k	
=	j	=	l	
=	<u>h</u>	=	m	
=	kh	=	n	
=	d	=	w	
=	dz	ح	=	h
=	r	=	'	
=	z	=	y	
=	s			
=	sy			
=	sh	â	=	a p
=	dl	î	=	i p
=	th	û	=	u p
=	zh	=	av	
=	'	=	ay	
=	gh			

### Untuk Madd dan Diftong

â	=	a panjang
î	=	i panjang
û	=	u panjang
	=	aw
	=	ay



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## DAPFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAPFTAR ISI	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metodologi Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Perkawinan	24
B. Putusnya Perkawinan	27
C. Hukum Putusnya Perkawinan	46
<b>BAB III : LANDASAN DAN DASAR HUKUM PERCERAIAN</b>	<b>56</b>
A. Hukum Islam tentang Perceraian	56
B. Konsep Cerai Gugat dalam Fiqh	60
C. Konsep Perceraian Perspektif Hukum Positif	77
<b>BAB IV : ANALISIS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM</b>	<b>84</b>
A. Faktor dan Putusnya Perceraian	84



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Akibat Hukum Putusnya Perceraian .....	103
C. Contoh Kasus Putusan Pengadilan Agama .....	117
<b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Perceraian dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi orang atau kedua orang pasangan di masyarakat manapun, tetapi harus juga dipandang sebagai suatu penemuan social, suatu macam pengaman bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri.<sup>1</sup>

Kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang

<sup>1</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media, 1991), hlm. 186



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga dalani suatu ikatan perkawinan, pada dasarnya merupakan fitrah atau naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya, pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-

<sup>2</sup> Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982), Hlm 12



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Keabadian kehidupan berumah tangga merupakan tujuan yang sangat diharapkan dalam perkawinan. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya dengan cara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah hingga akhir hayat. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, selain dari pada Allah selain yang menanamkan ikatan perjanjian suami isteri dengan sebutan *mitsaqan ghalidzan*<sup>3</sup>

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi kehidupan. Dia memiliki dimensi spiritual dan juga dimensi psikologis. Masing-masing dimensi memiliki konsekwensi logis bagi kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang berdimensi spiritual, manusia tidak

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1999). Cet VIII, hlm. 8



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

hanya untuk bersenang senang dan hura-hura saja, namun tugas utamanya dimuka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah swt. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah swt dalam Al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q.S. Adz dzariyat: 56)*

Namun bukan manusia namanya kalau dia hanya beribadah kepada Allah tanpa melampiaskan kebutuhan fisiologisnya. Karena makhluk yang hanya beribadah adalah malaikat, bukan manusia. Manusia memiliki berbagai motifasi fisiologis yang tidak boleh tidak dipenuhi. Diantara motifasi primer yang harus dilampiaskan keinginannya adalah nafsu seksual. Hanya melalui motifasi inilah eksistensi manusia dimuka bumi bisa terjaga. Allah swt telah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda hekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isterimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Al-Rum:21)*

Keabadian kehidupan dalam rumah tangga merupakan tujuan yang sangat diharapkan dalam suatu perkawinan. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya dengan cara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang inah hingga akhir hayat. Karena itu, maka dapat dikatan bahwasannya ikatan suami isteri adalah akatan yang paling suci dan paling



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kokoh. Tidak ada menunjukkan tentang sifat kesucian yang demikian agung itu, selain dari pada Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian suami isteri dengan sebutan *Mitsaqan Ghalidzan*, sebagaimana Allah berfirman:

وَكَيْفَ مِنْكُمْ مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“ Dan mereka (isteri-isterinya) mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.  
(Q.S Al-Nisa:21)

Yang mengatur masalah kekeluargaan (perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya), hal ini keluarga yang merupakan unit kemasyarakatan yang tericecil dalam setiap masyarakat.

Dari keluarga-keluarga yang baik, makmur dan bahagia tersusunlah. Dari sini dapat dilihat betapa Islam sangat menghargai kehidupan keluarga dengan suatu perhatian yang tidak pernah diberikan oleh syariat lain. Dapat dilihat begitu banyak ayat ahkam dalam Al-Qur'an masyarakat yang baik, makmur dan bahagia. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa tujuan ibadah dalam Islam adalah membentuk individu-individu yang baik dan berbudi pekerti luhur. Dari individu-individu serupa inilah keluarga baik akan dapat terbentuk, karena dapat dipahami mengapa ayat-ayat ahkam mementingkan soal hidup kekeluargaan.<sup>4</sup>

Salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan yang luwes, adil dan bijaksana yaitu suatu aturan yang dapat menghilangkan adanya pertentangan dalam rumah tangga, sebaliknya ia dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman yang dapat menghindarkan

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek (II)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986), hlm.8





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

dari bahaya perpecahan keluarga.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian.

Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarangi mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Subekti SH mendefinisikan perceraian adalah “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”<sup>5</sup>

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: psikologis, biologis, ekonomi. pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya,<sup>6</sup> sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga yang sering diiringi oleh persengketaan dan pertengkaran. Keadaan ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, namun ada juga yang tidak dapat didamaikan kembali yang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus. Untuk menjaga hubungan dan keadaan yang demikian agar kedua belah pihak tidak hidup dalam ikatan perkawinan yang penuh dengan

<sup>5</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXI: (Jakarta: PT Inter Massa, 1987), hlm.247

<sup>6</sup> Djaman Nur, *Fqih Munaqahat*, 1993 hal. 130



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pertengkaran permusuhan yang berakibat penderitaan yang berkepanjangan, maka agama Islam melalui syariatnya memberikan jalan keluar berupa perceraian bagi suami isteri yang gagal mendayung bahtera keluarganya.<sup>7</sup>

Perceraian dalam Islam memandangnya sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

*“Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah thalak” (HR. Abu Dawud)*

Islam menetapkan perkawinan itu dapat terputus karena adanya kematian dan atau karena perceraian. Sang suami dapat menjatuhkan thalaq satu, talak dua maupun thalaq tiga. Cara menjatuhkan thalaq ialah dengan ucapan, dengan arat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik thalaq dengan bahasa lisan atau bahasa tulisan tidak boleh dijadikan main-main. Menurut sebagian ulama madzhab terutama Imam Malik bin Anas dan al-Syafi'iy bila sampai terucap kata thalaq atau cerai, walaupun dalam keadaan mahfc-main ataupun dalam keadaan sedang marah, bisa berarti jatuh talak satu pada istri.<sup>8</sup>

Perceraian terjadi karena orang kurang mengerti dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Perceraian juga bisa terjadi karena kurangnya iman dan ambisi yang kuat, mengerti agama itu sangat penting. Kalau orang sudah mengerti dengan masalah agama maka akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Lebih baik memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada daripada memiliki pasangan baru yang bukan berarti masalah dalam rumah tangga tidak muncul lagi bukan?. Permasalahan

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Akademika Presindo. 1994). hlm.141

<sup>8</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dunia Ilmu, 1993) hlm.133



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

perkawinan juga dapat disebabkan karena orang-orang tidak mengerti benar bagaimana memilih teman hidup, seperti: Akhlaknya bagaimana, seagama atau tidak, beriman atau tidak, anak siapa yang menyangkut bobot, bibit, dan bebetnya, dan dunianya dalam arti bekerja atau tidak, berpendidikan atau tidak. Kalau beberapa aspek tersebut disaring dengan benar maka Insya Alloh permasalahan dalam perkawinan dapat terselesaikan tanpa menyinggung tentang perceraian

Thalaq, secara teori fikih menjadi hak bagi suami, dan dapat dilakukan langsung dengan cara ucapan thalaq walaupun tidak di depan sidang pengadilan apima. Akan tetapi thalaq dengan cara demikian dapat membawa dampak negatif yang lebih buruk bagi keduanya, seperti tidak adanya status yang pasti.<sup>9</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian itu terlarang. Dilarangnya perceraian, karena perceraian merupakan salah satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah SWT yaitu perkawinan. Kufar terhadap nikmat yang diberikan Allah merupakan hal yang haram, kecuali karena darurat. kategori darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri atau karena sudah tidak saling mencintai lagi.<sup>10</sup> Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam system Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm.65

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.345



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Diarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram.<sup>11</sup>

Untuk menghindari dampak negatif itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang berbentuk Undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 yang dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Bahkan hal ini di pertegas dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga perceraian diluar sidang pengadilan agama tidaklah sah dan tidak mengikat.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian tesis ini adalah analisis perceraian ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positif.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah tesis ini adalah tentang fiqh manakahat, dimana penulis ingin mengetahui analisis perceraian ditinjau dari aspek hukum Islam

<sup>11</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 252-254



dan hukum positif.

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>12</sup>
- b. Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas Masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Tesis ini mengangkat permasalahan analisis perceraian ditinjau dari

<sup>12</sup> Cbolid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

aspek hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana perceraian ditinjau dari hukum perkawinan?
- b. Bagaimana landasan hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian?
- c. Bagaimana analisis perceraian ditinjau dari aspek hukum?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perceraian ditinjau hukum perkawinan.
2. Untuk mengetahui landasan hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian.
3. Untuk mengetahui analisis perceraian ditinjau dari aspek hukum.

### D. Manfaat penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perceraian di tinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Secara khusus, penelitian tesis ini bertujuan untuk:

Berpijak pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Dalam Hukum Islam (Fiqh Islam), thalak bisa dijatuhkan oleh suami kepada isterinya dimana saja, baik dirumah, dijalan atau di tempat-tempat lainnya. Bahkan Jumhur Fuqoha salaf dan khalaf sepakat, bahwa thalak bisa jatuh aupun tidak ada saksi dan dalam keadaan main-main



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

(gurau). Akan tetapi di Indonesia berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, thalak hanyalah jatuh apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

## E. Tinjauan pustaka

Perceraian diawali dengan konflik dalam perkawinan antara suami dan istri. Peran konflik dalam perkawinan akan menghasilkan perselisihan dan mengurangi rasa sayang pada pasangannya. Pasangan yang bercerai memegang banyak konsep yang berbeda dari peran sebagai suami atau istri.

Perceraian membawa dampak terutama pada anak sebagai anggota keluarga. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Selain itu perceraian juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kenakalan di kalangan remaja.

Buku yang menjelaskan tentang perceraian "*Fikih Sunnah*" karya sayyid sabiq yang menjelaskan tentang perceraian dan dalam pandangan Islam.

Buku yang berjudul "Hukum Perkawinan Islam" karya Soemiyati yang menitik beratkan pada perkawinan dalam pandangan hukum positif.

Buku yang berjudul "*Pekmasalahan Perkawinan*" karya Rifyal Ka'bah dimana buku tersebut menjelaskan polemik-polemik sebuah keluarga yang mengakibatkan akan putusnya sebuah perkawinan.

Demikian pada penyusunan tesis ini, penyusun melakukan penelitian

mengenai analisis perceraian ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positif yang pada pokok masalah berbeda dengan beberapa penulis diatas.

## F. Kerangka Pemikiran

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan disamping karena kematian dan putusan hakim. Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya mempersulit terjadinya perceraian tetapi pada kenyatannya di dalam masyarakat, perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian. Bentuk pengajuan perceraian terdiri dari perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dan perceraian atas gugatan istri (cerai gugat) dengan masing-masing alasan atau penyebab yang dibenarkan dan dapat diterima oleh hakim untuk dikabulkan.

Alasan atau penyebab perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dapat ditinjau dari segi sisi administrasi hukum Pengadilan Agama dan dari sisi keluarga. Secara administrasi hukum Pengadilan Agama penyebab perceraian diantaranya karena krisis akhlak, faktor ekonomi, faktor biologi, faktor pihak ketiga dan faktor tidak ada tanggung jawab.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai thalaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan itu pada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang iapat mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>13</sup>

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini,

<sup>13</sup> Rasjid, *Sulaiman, Fiqh Islam*. (Jakarta: Atthariyah. 2004), hlm. 380



perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>14</sup>

Keretakan keluarga yang timbul dalam suatu ikatan perkawinan akan dapat diatasi sedemikian rupa jika niat hati masing-masing pihak untuk mempertahankan status perkawinan mereka yang suci terus dipupuk dengan saling memahami bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan. Dengan pemahaman semacam ini, akan dapat menurunkan ego serta rasa menang sendiri dan rasa paling berkuasa dalam lembaga perkawinan. Namun jika kegoncangan hubungan perkawinan tidak dapat diatasi, maka perceraianlah jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga, yang biasanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, kondisi kejiwaan dan watak masing-masing pasangan.<sup>15</sup>

Dibukanya pintu perceraian sebagai jalan keluar dari kemelut keluarga yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam hal ini dibenarkan berdasarkan firman Allah:

أَطْلِقْ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣١﴾

<sup>14</sup> Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, hlm. 7

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hlm. 4





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. A-Baqarah: 229)<sup>16</sup>*

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak lain, juga untuk memperoleh perlindungan hukum yang pasti.

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bagian yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mencakup dalam hal wilayah hukum mengadili suatu perkara, sedangkan kewenangan absolute mencakup segala materi yang menjadi perkara Peradilan Agama.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari badan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah disamping tiga kekuasaan kehakiman yang lain.

Hukum mengucapkan talak atau perceraian seorang isteri, hasilnya akan langsung dari pengucapan tersebut yaitu talak atau cerai, hasil tersebut diutuskan oleh Allah swt dan berada diluar control manusia.

Abu Ala Maududi menjelaskan bahwa hak seorang lelaki (suami)

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993)

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet, ke-3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 3

adalah dapat menceraikan isterinya yang tidak cocok untuk hidup bersama dengannya. Ia mendapat hak-hak perkawinan dengan mengeluarkan uangnya, maka yang diberi hak untuk melepaskan hak-hak tersebut.<sup>18</sup>

Hal ini dapat diberikan kepada isteri, karena apabila diberi hak semacam ini, ia akan lebih berani lagi dan akan melanggar hak-hak suaminya. Memberi hak seseorang hak untuk perceraian berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang sah. Hal ini akan menghambat terjadinya peningkatan kasus perceraian.<sup>19</sup>

Dalam bidang perkawinan dan perceraian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu merujuk kepada pendapat fuqaha' yang sangat dikenal dikalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa KHI menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam dalam bidang perkawinan dan perceraian. KHI juga mengakomodasi berbagai pandangan fuqaha' yang bersumber pada ajaran Islam yang sebagian telah dijadikan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>20</sup>

Putusnya sebuah perkawinan melalui perceraian merupakan fenomena alami dan bersifat universal. Pada setiap masa dan lingkungan masyarakat dimana saja, tidak akan terlepas dari problem distorsi perkawinan.

<sup>18</sup> Abo Ala Al-Maududi dkk, *Terjemahan Alawiyah, Pedoman Perkawinan dalam Islam Dilengkapi dalam Studi Kasus Perkawinan dan Perceraian*, (Darul Ulum Press, 1999) hlm. 32-33

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1977), hlm. 27

<sup>16</sup> Thayib, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 284



Untuk mengakhiri perkawinan yang sudah rusak dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, masyarakat dibelah dunia manapun terpaksa mencari jalan dan pembenaran yang legal yaitu perceraian,<sup>21</sup> Perceraian dalam Islam merupakan perkara yang halal tetapi sekaligus tercela karena dibenci oleh Allah. Syariat Islam memperbolehkan perceraian tetapi tidak merta, melainkan melalui berbagai tahapan. Islam mengatur tahapan-tahapan dan waktu yang tepat dijatuhkan kata thalaq.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberlakukan unsur ”mempersulit” dijatuhkannya kata talak. Unsur ini mempersempit pihak suami untuk menjatuhkan talak secara sewenang-wenang. Diantara ketentuan yang nyata-nyata memperkecil hak talak suami ialah, diharuskannya perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah dilakukan upaya-upaya mendamaikan oleh Pengadilan Agama. Dimana untuk menggunakan hak talak yang diberikan suami harus mengikuti beberapa prosedur yang ditentukan dan pada prinsipnya mencegah secara jelas terjadinya ikrar talak oleh suami. Ketika suami bermaksud menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk dilakukannya persidangan sebagai sarana dibolehkannya untuk menceraikan istrinya. Namun demikian, permohonan tersebut tidak secara otomatis dapat dikabulkan mengingat Pengadilan berkewajiban mempelajari beberapa masalah sehingga dinilai layak untuk dikabulkannya permohonan cerai yang dilakukan suami.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ketentuan KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan Hukum Islam (fiqih) menetapkan adanya kaharusan melakukan perceraian di depan hakim ataupun saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan integritas dan moralitasnya. Ketentuan hokum Islam dirasakan sangat mempengaruhi ketentuan perundangan perkawinan dan perceraian yang diberlakukan oleh KHI. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya menganut prinsip yang sama yaitu disyaratkannya saksi-saksi atau hakim dalam menjatuhkan kata atau ikrar talak sebagai tanda putusnya perkawinan sepasang suami istri yang benar-benar tidak dapat didamaikan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis.

Dengan diberlakukan Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama islam antara lain adalah mengenai perceraian. Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasanya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.



## G. Metodologi Penelitian

Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ini:

### 1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan penulis di bagian sebelumnya, maka data yang hendak dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan perceraian dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

### 2. Sumber Data

Untuk memenuhi data yang tersinggung di atas, maka diperlukan sumber primer dan sekunder.

Sumber primer sebagai sumber pokok dalam studi analisis ini adalah sebuah karya-karya yang menjelaskan perceraian agar penulis dengan mudah menganalisis sebuah karya tersebut.

Sedangkan sumber sekunder sebagai sumber pendukung adalah kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, buku yang menyinggung tentang perkawinan Islam dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis membaca dan menelaah buku memuat pendapat Sayis Sabiq, Soemiyati, Idris Ramulyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan sumber buku yang lain mengenai perceraian. Selain itu, untuk memperdalam ketajaman studi analisis ini, penulis juga buku maupun





tulisan yang secara umum berkenaan dengan perceraian Islam di samping yang secara khusus berkenaan dengan perceraian dalam pandangan hukum positif pula.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam studi analisis ini, data-data yang terhimpun akan di analisis secara mendalam dengan menggunakan metode *deksriptif*, *deduktif* dan *kualitatif*.

Berikut pengertian tiga metode yang dipakai tersebut :

##### a. Metode Deskriptif

Yaitu metode yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya sesuai temuan yang di dapat.<sup>22</sup>

##### b. Metode Deduktif

Yaitu metode dimana studi analisis dilakukan dengan cara memberi alasan berpikir dan bertolak dari pernyataan umum yang bersifat khusus dari obyek yang diteliti.<sup>23</sup>

##### c. Metode Kualitatif

Yaitu metode yang dimana studi analisis akan mengeluarkan hasil berbentuk temuan-temuan non statistik sesuai dengan proses yang telah dilalui.

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 107

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, tentunya agar memperoleh gambaran yang jelas dalam tesis ini, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**, yang terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Putusnya Perkawinan dan Hukum Putusnya Perkawinan.

**BAB III : LANDASAN DAN DASAR HUKUM PERCERAIAN**, yang terdiri dari: Hukum Islam tentang Perceraian, Konsep Cerai Gugat dalam Fiqh dan Konsep Perceraian Perspektif Hukum Positif.

**BAB IV : ANALISIS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM**, yang terdiri dari: Faktor dan Putusnya Perceraian, Akibat Hukum Putusnya Perceraian dan Contoh Kasus Putusan Pengadilan Agama.

**BAB V : KESIMPULAN**, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Diarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAPFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Akademika Presindo, 1994
- Abu Ala Al-Maududi dkk, *Terjemahan Alawiyah, Pedoman Perkawinan dalm Islam Dilengkapi dengan Studi Kasus Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999
- Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah Surabaya*: AL-Ikhlash
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1999
- Abdul Manan, Mfauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama, Cet 5* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20002
- Abdul Azis Dahlan (et all), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abun Bunyamin, “*Hadhanah dan Problematka suatu Analisa terhadap Pemegang Hadhanah dalam Kaitannya dengan Kepemntingan Anak*”. *Mimbar Hukum*, Januari-Februari 2000
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974*. Jakarta:PT Dian Rakyat
- Abdul Manan, Mfauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama, Cet 5*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20002
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, diterjemahkan Oleh Fadhli Bahri, Cet. 2 Jakarta: Darul Falah, 2001
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Thalaq, Bab Tafrihu Abwabu at Thalaq, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, t.t.
- An-Nasai ,*Sunan Nasai*,Kitab At-Thalaq,Bab.Ma Sa’afi Al-Khulu, Dar Al-Mahtabah Al-Ilmiyyah, Beirut libanon, t.t,
- Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama,Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, Jakarta: Citra Aditya Bakti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam system Hukum Nasional* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1977

Djamal Latief *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dunia Ilmu, 1993

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek (II)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah. 2004

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,. Cet XXI. Jakatra: PT Inter Massa, 1987

Thayib, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Binallmu, 1984

Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah 5*, Bandung: PT. Alma'arif, 1973

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang *Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 99 (1) dan 105*

H.A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Setia, 1994

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, 2008

Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Kitab at-Thalaq, Thoha Putra, Semarang, t.t.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Bab. Al- Talaq Dar al- Jiil, Beirut Libanon, cet. I, 1989,

Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice* (Third Edition), Hampshire: Ashgate Publishing Ltd, 2008

Lili Rasjidi, SH., LLM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Asy-Syathibi. Al-Muwafaqat fi Ushulisy Syari'ah. Al-Maktabah al-Tijariyah Mesir

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa, Ttp

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, Ttp

Firdaus AN, *Riddah Sebagai Kanker Aqidah*, Panji Masyarakat No.412, Tahun 2005

H. Chuzuzaimah T Yanggo, HA. Hafiz AZ, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer, Cet 4*, Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan

H. Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia

MUI, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Mengacu Kepada UU no.1/1974 tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Tahun 1980* Jakarta: Masjid Istiqlal, 1980

H.A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Setia, 1994